

# MENGURANGI KETIMPANGAN, MELURUSKAN ESENSI PEMBANGUNAN <sup>1</sup>

Wijayanto Samirin

## *Summary*

*Over the last one decade, Indonesian economy has become interesting topic in the global economic arena, especially concerning its ability to perform well despite the global economic turbulence. When other countries experienced difficulty, Indonesian economy was able to maintain economic growth.*

*Unfortunately, despite the above encouraging news, it is still unclear whose actually enjoy the increase of the economic pie. In fact, income inequality grew fast and booked its highest record in 2012. The situation become more challenging since the above inequality is also accompanied by the high wealth and land ownership inequality.*

*There are few theories that could justify the incidence of the increase in inequality in Indonesia, in short the theories shows that inequality is a process toward prosperity. However, various studies also indicate that the above logic are not applicable for Indonesia.*

*Indonesia is entering a crucial time, to rethinking its economic design. Without accompanied by economic equality, high economic growth will not able to improve life quality. In fact, this may reduce the social cohesion among people, a serious situation for a pluralistic nation like Indonesia. Inequality should be reduced, constitution and national philosophy should be reflected in various Government policies.*

*This paper describe and discuss economic inequality in Indonesia, several relevant theories concerning inequality, impact of inequality, lesson learned fro other countries, as well as several recommendation to address iunequality issue in Indonesia.*

Dalam satu dasawarsa terakhir, kita sering mendengarkan pujian dari berbagai lembaga internasional tentang prestasi ekonomi Indonesia yang gemilang. Perekonomian kita menunjukkan pertumbuhan yang solid, ditengah-tengah krisis ekonomi yang menerpa dunia. Ketika negara lain, termasuk negara tetangga, mengalami masalah, Indonesia tetap tumbuh dengan meyakinkan.

IMF (2011) memprediksikan bahwa kue ekonomi Indonesia pada tahun 2050 akan mencapai US Dollar 7 triliun, dan berada pada ranking 7 dunia, setelah setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Mexico dan Rusia. IMF tidak sendirian, PricewaterhouseCoopers (2013) mempunyai pandangan yang tak kalah positif dan memperkirakan bahwa pada tahun

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis ke-16, Universitas Paramadina Jakarta, 10 Januari 2014.

yang sama Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke 8 dunia, dengan ukuran ekonomi sebesar US Dollar 6,3 triliun.

McKinsey (2012), lebih optimis lagi dengan memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara terbesar ke tujuh di dunia, menggeser posisi Jerman dan Inggris. World Bank (2011) pun tidak mau ketinggalan, ia memperkirakan bahwa hingga 2025, Indonesia akan menjadi satu dari 6 negara yang mempunyai kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

Boleh saja kita bangga dengan berbagai prediksi tersebut, tetapi kita harus selalu waspada. Ada beberapa catatan yang harus selalu kita buka. *Pertama*, sejarah menunjukkan bahwa para pengamat sering terjebak dalam *the fallacy of linierity*, yaitu cara berpikir yang mengasumsikan apa yang terjadi di masa lalu akan berlanjut dimasa mendatang. Permasalahannya, ekonomi adalah sistem yang kompleks dengan jutaan variabel dan variabel-variabel tersebut hampir selalu tidak linier.

Pada tahun 80-an, para pengamat meyakini bahwa ukuran ekonomi Jepang akan menyalip USA sebelum milenium ke-20 berakhir; ternyata pandangan tersebut tidak terbukti hingga kini. Paul Samuelson, *nobelaurette*, memperkirakan ekonomi Uni Soviet akan lebih besar dari USA pada tahun 1984. Lalu ia revisi proyeksi tersebut menjadi 1997, lalu 2002, dan lalu 2012; faktanya hingga kini proyeksi tersebut tidak pernah terjadi (Acemoglu & Robinson, 2012). Kata Karl Marx, para pemikir sering terjebak dalam cara berpikir linier dan mereka seperti orang sedang naik kereta api dan duduk di atap gerbong; ketika rel berbelok, sebagian besar mereka pun terjatuh (Buchholz, 1989).

*Kedua*, berbagai proyeksi yang positif tersebut tidak menjelaskan esensi penting dari pertumbuhan ekonomi yaitu siapa yang menikmatinya, apakah kelompok tertentu atau rakyat kebanyakan. Statistik menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia makin lebar. Pada tahun 1990, 10% orang terkaya Indonesia mempunyai pendapatan setara dengan 5,9 kali pendapatan 10% orang termiskin; pada tahun 2005 dan 2011, proporsi tersebut naik menjadi 7,8 kali dan 9,5 kali.<sup>2</sup> Jika diukur menggunakan penguasaan aset dan penguasaan tanah, maka ketimpangan itu akan lebih mencolok.

Berdasarkan Gini income<sup>3</sup>, yang selanjutnya dalam *paper* ini disebut “Gini”, sebuah ukuran yang paling populer, ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan pesat pada periode 2002 – 2013, seiring dengan pertumbuhan ekonomi; hal ini mengindikasikan adanya keterkaitan sistemik antara keduanya.

---

<sup>2</sup> Kalkulasi penulis dari data World Development Indicator 2013, World Bank.

<sup>3</sup> Gini Indeks mempunyai *range* dari nol hingga satu. Satu untuk ketimpangan sempurna, dan nol untuk kesetaraan yang sempurna.

Terlepas dari perbaikan sederet indikator makro ekonomi, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Menurut data BPS (2013), jika diukur dengan garis kemiskinan dan standar jam kerja yang tergolong rendah, saat ini sekitar 11,55% rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan 6,25% dinyatakan menganggur.<sup>4</sup> Setelah secara simultan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, pada tahun 2013 angka tersebut berpotensi memburuk di tahun 2014. Jika garis kemiskinan yang berada dikisaran US Dollar 1,25 per kapita per hari dinaikkan menjadi US Dollar 2 saja, maka lebih dari 50% rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

### **GDP Bukanlah Segalanya**

GDP merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting, tetapi bukan segalanya. Menurut Robert Kennedy, GDP mengukur banyak hal, kecuali hal-hal yang membuat hidup bermakna (The Guardian, 2012). GDP tidak mampu menangkap berbagai fenomena yang penting bagi kualitas hidup manusia.

Dominasi GDP sebagai ukuran sukses pembangunan tidak terlepas dari konsep utilitarianism yang melekat di benak para pembuat kebijakan. Konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan Stuart Mill tersebut berprinsip bahwa manusia menentukan pilihan ekonomi berdasarkan seberapa besar pilihan tersebut bisa memaksimalkan konsumsi, yang identik dengan memaksimalkan tingkat kepuasan (Conway, 2011).

Selain itu data GDP dari berbagai negara relatif mudah didapat, dengan kualitas data yang baik; hal ini tidak lepas dari sifat GDP yang mudah diukur dan dibandingkan. Sejak pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1665 oleh Sir William Petty, GDP sebagai ukuran ekonomi mulai diadopsi oleh berbagai negara (Dictionary of National Biography, 2000). Dampaknya, semakin banyak analisis ekonomi menggunakan data GDP sebagai basis utama.

Terlepas dari pro-kontra GDP, ia merupakan titik awal bagi suatu negara untuk mewujudkan kemajuan, dengan catatan jika “kue” tersebut dapat sebar secara merata dan terjaga keberlanjutannya. Mekanisme pendorong pemerataan sangatlah penting jika kesetaraan ekonomi menjadi sasaran, karena secara alamiah ketimpangan ekonomi cenderung melebar.

---

<sup>4</sup> Garis Kemiskinan di Indonesia saat ini adalah Rp 292.951 per kapita per bulan, atau ekuivalen dengan US Dollar 1,25 per kapita per hari. Untuk pengangguran Indonesia menggunakan definisi ILO, yaitu seseorang didefinisikan bekerja jika berusia di atas 15 tahun, berkeinginan untuk kerja dan bekerja minimal satu jam per-minggu.

### **Ketimpangan, Suatu Kewajaran?**

Branko Milanovic (2011) dalam bukunya “*The Haves and the Have-Nots*” mengatakan bahwa ketimpangan sudah ada sejak jaman Romawi Kuno. Mewujudkan masyarakat yang benar-benar setara merupakan utopia yang tidak akan terwujud. Impian untuk mewujudkan kesetaraan semakin menantang di saat perekonomian global sedang didominasi oleh pandangan yang menempatkan kesetaraan bukan sebagai agenda utama. Kapitalisme memandang kesetaraan dan efisiensi sebagai pilihan; dan kapitalisme menempatkan efisiensi di tempat yang lebih tinggi (Okun, 1975).

Ada sederet pemikiran yang sering dimanfaatkan para pakar untuk menjelaskan bahwa ketimpangan adalah kewajaran, sebagai proses yang harus dilalui untuk menuju kemajuan. Beberapa pemikiran tersebut di antaranya:

#### *Konsep Kuznets*

Konsep ini diperkenalkan oleh Simon Smith Kuznets pada tahun 1955. Ia menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi akan membesar saat suatu negara mengalami pertumbuhan, sebelum akhirnya menurun setelah kemakmuran tercapai. Dalam kondisi tertentu, ketimpangan “diperlukan” untuk mewujudkan pertumbuhan. Beberapa negara maju dengan sejarah ekonomi yang panjang terbukti mengikuti pakem yang digambarkan oleh Kuznets (Summers, *et al.* 1984).

Dalam kata lain, munculnya kelompok kaya dan miskin dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Kelompok kaya berkesempatan mengumpulkan modal dan dengan modal tersebut mereka memulai bisnis. Aktifitas ini menggerakkan ekonomi, mempekerjakan karyawan, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Faktanya, kondisi saat ini berbeda dengan situasi pada tahun 1950-an ketika Kuznets melakukan analisis empiris. Globalisasi mendorong mobilitas ide, modal, barang, jasa dan manusia melewati batas negara. Kebutuhan modal yang dahulu terbatas pada tabungan domestik, saat ini dapat diperoleh di pasar global. Artinya, akumulasi tabungan domestik bukanlah satu-satunya sumber.

Faktor lain yang menunjukkan bahwa teori Kuznets kurang relevan adalah perbedaan struktur ekonomi antar negara. Di negara dengan industri yang dominan, investasi akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga kemakmuran pun terdistribusi. Di negara dengan ekonomi yang didominasi *low tech product* dan sumber daya alam, dampak bagi kemakmuran rakyat akan sangat terbatas. Teori Kuznets kurang relevan untuk negara-negara berkembang (Deininger, *et al.* 1998); dalam konteks ini termasuk untuk Indonesia.

### *Konsep Conditional Convergence*

Globalisasi mempersempit kesenjangan pendapatan antara penduduk negara kaya dan negara berkembang, terutama negara berkembang dengan sumber daya manusia berkualitas, penghormatan terhadap hak intelektual dan aset privat, serta keterbukaan ekonomi yang memenuhi level tertentu, yang sering disebut *the convergence club* (Sachs *et al.*, 1995).

Globalisasi memungkinkan modal berpindah ke negara yang lebih efisien. Industri pun tumbuh dengan pesat di negara berkembang. Dampaknya, ketimpangan antar negara di dunia menurun drastis paska tahun 2000 (Canadian Board Conference, 2012). Pada tahun 1980, rata-rata GDP per kapita negara berkembang di Asia Pasific, representasi dari *the convergence club*, hanya sekitar 4% GDP per kapita negara kaya anggota OECD, pada tahun 2012, angka tersebut naik menjadi 19%, dan trend in terus berlanjut.<sup>5</sup>

Faktor lain pendorong konvergensi adalah fenomena alamiah dimana semakin tinggi GDP per kapita, semakin sulit bagi ekonomi suatu negara untuk tumbuh cepat. GDP per kapita ibarat kecepatan dan pertumbuhan ekonomi adalah akselerasi mobil. Semakin cepat mobil berlari, semakin sulit berakselerasi. Sebaliknya, ketika mobil berjalan perlahan, akselerasi bukanlah hal yang sulit.

Konvergensi atau menyempitnya gap antar negara tersebut diikuti oleh melebarnya gap dalam negara. Ekonom Harvard, Richman Freeman (2011) mengatakan bahwa globalisasi meningkatkan standar hidup miliaran manusia sehingga ketimpangan antar negara mengalami penurunan, tetapi ketimpangan internal di kebanyakan negara justru meningkat.

Kendatipun demikian banyak negara yang berhasil mempertahankan tingkat Gini-nya, bahkan justru berhasil menurunkannya. Swedia, Inggris, Irlandia, Belgia, Italia dan Swis, adalah beberapa negara yang berhasil menurunkannya. Menurut Joseph Stiglitz (2012), sebagian besar penyebab ketimpangan adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, maupun yang tidak. Artinya pemerintah mempunyai peran besar dalam hal ini.

### *Konsep Trickle-down*

*Trickle-down* adalah konsep yang populer di era 1970-1990. Beberapa ekonom yang diasosiasikan dengan pemikiran ini di antaranya adalah Robert Mundell dan Arthur Laffer. Paham ini meyakini bahwa terciptanya kelompok makmur akan menimbulkan efek menetes ke bawah sehingga rakyat kebanyakan pun akan meningkat kemakmurannya.

Paham ini populer dikalangan penganut *supply side economic*, di mana sektor swasta dan korporasi, diposisikan sebagai titik sentral

---

<sup>5</sup> Perhitungan oleh penulis, berdasarkan data GDP per kapita (PPP) pada World Development Index 2012, World Bank.

perputaran mesin ekonomi. Pemerintah memberikan insentif agar korporasi tumbuh pesat sehingga mampu mempekerjakan banyak karyawan. Pada gilirannya, para karyawan tersebut akan membayar berbagai jenis pajak, sumber utama pendapatan negara.

Di Amerika Serikat, konsep yang banyak diacu oleh para pemikir Republican ini ternyata menuai masalah. Pertumbuhan ekonomi mendongkrak biaya produksi di dalam negeri; dampaknya, swasta mengalihkan investasi ke luar negeri atau memanfaatkan teknologi untuk mengurangi tenaga kerja. Siklus pun terganggu, tingkat pengangguran meningkat dan kualitas hidup menurun.

Di Indonesia, konsep *trickle down* populer di era 1980-90. Berbagai fasilitas untuk swasta diberikan dengan justifikasi bahwa swasta yang kokoh akan memakmurkan rakyat. Konsep ini sering dijadikan alibi bagi pemberian preferensi kepada kelompok ekonomi tertentu.

Ketika ekonomi menganut sistem pengupahan yang *fleksible*, seperti di Indonesia saat ini, tekanan untuk menurunkan biaya produksi ditransfer kepada para pekerja. Jika biaya tenaga kerja meningkat, maka dunia bisnis akan berusaha melakukan efisiensi untuk tidak menambah pekerja atau bahkan menguranginya, kecuali pekerja yang dianggap murah (Persky et al., 2004); karenanya fenomena *trickle down* mempunyai peran yang sangat terbatas dalam mengurangi ketimpangan.

Efek menetes ke bawah terjadi di Indonesia, tetapi dalam skala yang kecil. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang makin didominasi oleh sektor komoditas/kekayaan alam, sektor yang tidak mempekerjakan banyak *skilled labor*, sehingga multiplier yang terjadi pun tidaklah besar. Intinya, konsep *trickle down* kurang relevan bagi Indonesia, justru cenderung menyebabkan pemusatan kekuatan ekonomi yang berujung pada ketimpangan.

### *Gini Indonesia Relatif Lebih Baik*

Apabila diukur dengan Gini, Indonesia masih relatif lebih baik dari beberapa negara tetangga. Harus dipahami bahwa Gini mengandung bias di dalamnya. Gini dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat yang diperoleh melalui survei. Dalam survei *income* seperti ini, ada fenomena di mana mereka yang kaya cenderung mengaku lebih miskin sedangkan yang miskin cenderung mengaku lebih kaya. Bisa jadi, ketimpangan yang sesungguhnya lebih tinggi dari hasil survei. Studi oleh World Bank (2013) menunjukkan bahwa jika yang dipergunakan adalah pengeluaran individu, maka ketimpangan yang diperoleh akan jauh lebih tinggi.<sup>6</sup>

Dalam kenyataannya, daya beli lebih relevan daripada jumlah pendapatan untuk mengukur kemakmuran seseorang. Pendapatan Rp 2 juta per bulan, di suatu tempat dengan fasilitas transportasi umum yang

---

<sup>6</sup> Disampaikan dalam diskusi terbatas Development Policy Review, “*Poverty, Vulnerability and Inequality in Indonesia: An Overview*”, di kantor World Bank, 12 November 2013.

terjangkau, fasilitas kesehatan gratis, subsidi perumahan, subsidi pupuk, beasiswa dan sekolah murah, serta harga bahan pokok terjangkau tentunya lebih makmur daripada mereka yang hidup dengan pendapatan sama tanpa fasilitas umum yang handal.

Idealnya, Gini diperhitungkan berdasarkan *household adjusted disposable income (HADI)*, yaitu pendapatan setelah disesuaikan dengan berbagai *public goods* atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang bisa diperoleh masyarakat secara gratis atau sangat murah (OECD, 2012). Sayangnya, tidak mudah untuk mengukur nilai *public goods* yang dikonsumsi oleh masyarakat.

### **Ketimpangan di Indonesia**

Seperti telah diulas pada bagian awal *paper* ini, ketimpangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam satu dekade terakhir. Tetapi, yang lebih mengkhawatirkan adalah *trend* peningkatan tersebut yang berjalan cepat dan bersifat sistemik.

Berdasarkan rata-rata Gini (1990-1999) dan (2000 – 2012), Indonesia merupakan negara dengan perubahan Gini hampir 20%, lebih tinggi dari negara lain di kawasan dan anggota BRIC.<sup>7</sup> Sebaliknya, Malaysia, Thailand dan Russia merupakan negara yang berhasil menurunkan Gini, walaupun nilai Gini mereka pada tahun 2012 masih lebih tinggi dari Indonesia.

Selain Gini *income*, ada faktor lain yang juga penting untuk dijadikan acuan dalam menganalisis ketimpangan, yaitu Gini *wealth* (kekayaan) dan Gini tanah (kepemilikan tanah). Kekayaan berperan untuk mendapatkan *income* dan menurut Hernando De Soto (2003), segala jenis *asset* sesungguhnya adalah modal yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan *income*. Dalam konteks ini, ketimpangan *asset* bisa dijadikan indikasi potensi ketimpangan jangka panjang. Mereka yang mempunyai *asset* berpotensi mendapatkan *income* darinya.

Menurut survei Rand Institute (1997), sekitar 1% orang terkaya Indonesia menguasai 28,7% total *asset*, sedangkan 5% dan 10% terkaya menguasai 56% dan 65,4% *asset*. Aset yang dikuasai oleh 10% orang terkaya di Indonesia (65,4%) jauh diatas proporsi *income* mereka sebesar 30% (WDI, 2013). Penguasaan aset di Indonesia lebih terpusat daripada *income*. Dalam hal ini, kondisi Indonesia berada pada posisi 17 negara paling timpang berdasarkan Gini *wealth*, dari 150 negara yang disurvei (Davies, 2009).

---

<sup>7</sup> Angka perubahan Gini dihitung dengan mengukur perubahan Gini rata-rata (1990-1999) dengan (2000 – 2012) yang tercantum dalam WDI 2013. Tidak semua negara mempunyai data Gini tahunan yang lengkap, sehingga persentase perubahan Gini harus dilihat sebagai pendekatan, berdasarkan *best data available*. BRIC adalah kependekan dari Brazil, India, Russia dan China, empat negara yang oleh Goldman Sachs dianggap sebagai motor kemajuan ekonomi global di masa mendatang.

Davies dkk. (2009) mengindikasikan bahwa pemusatan penguasaan *asset* tersebut mengindikasikan buruknya kualitas *public goods* dan *common resources*. Dalam daratan yang lebih makro, pemusatan aset ini diakibatkan oleh keberpihakan pemerintah kepada kelompok ekonomi tertentu.

Sebagai negara agraris di mana sekitar 39% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, kepemilikan tanah merupakan kunci kemakmuran. Sayangnya, menurut Badan Pertanahan Nasional, Gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72, sebuah kondisi yang mengkhawatirkan<sup>8</sup>. Deininger dan Olinto (1999) berpendapat bahwa ketimpangan kepemilikan tanah menyebabkan pendapatan masyarakat pedesaan rendah dan tidak stabil, hal ini mempengaruhi peningkatan kualitas *human capital* masyarakat pedesaan, yang umumnya di Indonesia berprofesi sebagai petani. Pandangan ini menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan, yaitu 14,42% dan 8,52% pada (BPS, 2013).

Bagi Indonesia, ketimpangan yang diindikasikan oleh Gini *income* hanya merupakan ujung dari sebuah gunung es. Dibalik angka tersebut, terdapat ketimpangan penguasaan *asset* dan penguasaan tanah yang perlu mendapatkan perhatian. Redistribusi aset *relative* sulit dilakukan, apalagi redistribusi tanah (*land reform*). Diperlukan kebijakan kreatif dan inovatif, agar pemerataan kesejahteraan dapat tetap terwujud di negeri ini.

### **Ketimpangan dan Kualitas Hidup Manusia**

Dalam bukunya, *The Spirit Level*, Wilkinson dan Pickett (2010) menunjukkan keterkaitan erat antara ketimpangan dengan kualitas hidup atau *well-being* suatu bangsa. Secara lebih rinci, penurunan *well-being* suatu bangsa dapat terganggu oleh konflik sosial, meningkatnya tindakan kriminal, penurunan tingkat kebahagiaan, hilangnya *social trust*, dan munculnya ketidakstabilan politik.

#### *Tingkat Kriminal*

Tingginya tingkat kriminal merupakan indikasi rusaknya tatanan masyarakat. Berbagai survei untuk menentukan ranking *the most livable city*, atau kota yang paling menjanjikan kualitas hidup tinggi bagi warganya, selalu menempatkan tingkat kriminalitas sebagai indikator utama. Fenomena ini merupakan salah satu indikasi pentingnya rasa aman dalam mewujudkan kualitas hidup.

Berbagai studi menunjukkan keterkaitan yang kuat antara ketimpangan dan tingkat kriminal. Lederman *et al.* (2001) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan faktor penyebab tindakan kriminal, sehingga semakin timpang suatu kota atau negara semakin tinggi tingkat kriminalitasnya. Lalu, Stack (1984) memberikan penjelasan lebih rinci, bahwa ketimpangan ekonomi menimbulkan tensi sosial yang tinggi

---

<sup>8</sup> Disampaikan oleh Erani Yustika dalam diskusi pakar yang diadakan oleh Universitas Paramadina, bertajuk "Meninjau kembali disain perekonomian Indonesia", 25 November 2013.



dikalangan mereka yang kurang mampu, sebagai akibat perasaan termarginalisasi atau tersingkir oleh kelompok yang lebih kaya. Tensi tersebut merupakan pemicu tindakan kriminal; itulah mengapa aktivitas kriminal umumnya cenderung melibatkan mereka yang berasal dari golongan ekonomi bawah (Braithewaite, 1970).

Faktor rendahnya potensi pendapatan yang harus dikorbankan oleh mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah membuat *opportunity cost* bagi mereka jika tertangkap relatif rendah; akibatnya mereka lebih mudah terdorong untuk melakukan tindak kriminal (Thorbheckhe & Charumilind, 2002). Kriminal merupakan tindakan yang didasari pada keputusan logis. Dengan meniadakan peran iman/moral seseorang, jika potensi manfaat (*potential benefit*) lebih besar dari potensi pengorbanan (*opportunity cost*) setelah memperhitungkan probabilitas tertangkap, maka tindakan kriminal cenderung dilakukan.

### *Kebahagiaan*

Mengukur tingkat kebahagiaan bukanlah hal mudah, apalagi jika dilakukan lintas negara dengan budaya yang berbeda. Masyarakat Timur mempunyai karakteristik yang unik sehingga mempunyai ukuran dan cara pandang terhadap kebahagiaan yang berbeda dengan masyarakat Barat (Wilkinson & Pickett, 2009). Kendatipun demikian, terdapat *patern* tertentu di mana semakin timpang suatu masyarakat semakin rendah tingkat kebahagiaan mereka. Yang menarik, ternyata kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan kemakmuran atau pendapatan.

Oishi dan kawan-kawan (2012) melakukan studi tentang tingkat kebahagiaan masyarakat Amerika Serikat dan menemukan fakta walaupun GDP per kapita mereka mengalami peningkatan yang drastis, tetapi tingkat kebahagiaan masyarakat Amerika pada periode 1972 – 2008 justru memburuk; pada periode yang sama ketimpangan ekonomi di sana semakin melebar. Penurunan kebahagiaan muncul melalui beberapa pintu, di antaranya adalah karena melemahnya tingkat kepercayaan (*social trust*) dan turunnya rasa keadilan (*fairness*) di masyarakat.

World Happiness Report (2013), mengeluarkan ranking kebahagiaan berbagai negara dengan menggunakan pendekatan obyektif. *Report* ini menempatkan Denmark, Norwegia, dan Swiss sebagai negara paling bahagia; bukanlah suatu kebetulan bahwa ketiga negara tersebut mempunyai tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat rendah. Dalam studi tersebut, Indonesia berada pada posisi 76 dari 156 negara yang distudi, di atas Filipina, India dan China, tetapi sedikit lebih rendah dari Thailand dan Malaysia.

Manusia selalu berpikir relatif dan cenderung membandingkan diri dan sekelilingnya. Dampaknya, semakin tinggi kualitas dan kuantitas barang yang dikonsumsi oleh suatu kelompok akan membuat kelompok lain mengalami penurunan tingkat kepuasan karena merasa barang yang dikonsumsi lebih sedikit atau inferior (Layard, 2005).

### *Social Trust*

Dipercaya oleh lingkungannya merupakan kebutuhan penting manusia. Ketika seseorang dipercaya, maka tubuhnya akan mengeluarkan hormon *oxytocin* yang membuat seseorang merasa bahagia dan cenderung mempercayai orang lain (Kosfeld, et al., 2005). Seperti *chain reaction*, hormon *oxytocin* orang lain pun akan meningkat dan mereka akan cenderung mempercayai orang lain. Itulah mengapa *trust* menyebar dengan cepat, begitu pula *distrust*.

Wilkinson (2009) mengatakan bahwa ketimpangan menyebabkan berbagai masalah sosial, di mana melemahnya *trust* dalam masyarakat adalah titik awal dari munculnya berbagai *problem* tersebut. Semakin lebar ketimpangan ekonomi maka semakin lebar perbedaan antar kelompok sehingga ketidakpastian semakin meningkat yang pada gilirannya akan menurunkan *trust* (Steijn et al., 2011). Secara naluriah, manusia cenderung berinteraksi dengan mereka yang setara, termasuk secara ekonomi, untuk meningkatkan rasa aman mereka (Wilkinson, 2009); semakin lebar *gap* ekonomi, semakin jarang berinteraksi sehingga *trust* pun akan luntur.

Ketimpangan ekonomi menciptakan kelas dalam masyarakat, ia menciptakan sekelompok masyarakat kelas bawah yang mengisi kawasan kumuh diperkotaan atau daerah terbelakang di pedesaan. Menurut Delhey (2005), mereka yang tinggal di lingkungan yang terbelakang secara ekonomi cenderung hidup dengan risiko yang lebih tinggi karena rendahnya kepastian hukum. Risiko dan *trust* seperti saudara kembar yang duduk pada dua sisi ayunan yang berlawanan; semakin tinggi risiko hidup yang dihadapi dalam keseharian, semakin rendah tingkat *trust* dalam masyarakat dan begitu pula sebaliknya.

*Trust* dalam masyarakat sangat diperlukan karena ini menurunkan biaya transaksi dan membuka peluang aktifitas ekonomi baru. Bisnis sulit berkembang ketika *trust* antara pelaku bisnis tidak muncul. Menurut Fukuyama (1995) *trust* memungkinkan masyarakat mengorganisasi dirinya dalam institusi yang lebih besar dan efisien, apakah itu institusi bisnis maupun pemerintahan, sebuah prasyarat bagi suatu bangsa untuk maju.

Dalam bukunya *Bowling Alone*, Putnam (2000) menggunakan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial sebagai indikator tingkat *trust*, dan dalam studinya ia menemukan bahwa semakin timpang suatu komunitas semakin rendah partisipasinya mereka dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, artinya *trust* pun melemah. Padahal, sebagai makhluk sosial, partisipasi tersebut akan membuat hidup menjadi lebih bernilai,

### *Konflik Sosial, Stabilitas Politik, dan Keberlanjutan Kemajuan Ekonomi*

Ketimpangan berkaitan erat dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Persson, 1991). Bahkan sejarah membuktikan bahwa ketimpangan ekonomi lebih *urgent* dari pada faktor lingkungan dan ketersediaan energi yang selama ini lebih sering dijadikan fokus utama ketika kita berbicara tentang *sustainability*.

Faktor lingkungan dan ketersediaan energi berperan penting, tetapi dampak yang diakibatkan terjadi perlahan sehingga manusia mampu merespon. Selain itu, mekanisme pasar memungkinkan harga bergerak naik ataupun turun. Kenaikan harga memberikan *signal* bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Situasi ini mendorong manusia untuk beralih ke alternatif lain yang lebih *feasible*. Ketimpangan ekonomi tidak mengenal pasar, sehingga permasalahan bisa meledak secara tak disangka dengan dampak yang tak terduga.

Fenomena Arab Spring merupakan pembelajaran yang teramat penting bagi bangsa-bangsa di dunia, terutama terkait kesetaraan kesempatan ekonomi dan politik. Kejatuhan Ben Ali, yang sudah memimpin Tunisia selama lebih dari 23 tahun, diawali oleh kematian Mohamed Bouazizi, seorang pedagang kaki lima. Sebagai protes atas pengusiran dan penahanan barang dagangannya oleh polisi setempat, ia membakar diri dan tewas. Kematian Bouazizi, yang nasibnya merepresentasikan jutaan warga Tunisia, menjadi momentum bagi rakyat untuk meluapkan amarah kepada penguasa (BBC, 2009). Fenomena yang mirip terjadi di Mesir dan Libya.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami fenomena yang hampir sama. Ketimpangan ekonomi yang sudah buruk diperburuk oleh krisis ekonomi 1998 yang mengakibatkan ekonomi menyusut 13% dalam satu tahun, dan ekonomi nyaris tidak tumbuh selama lima tahun setelah krisis.<sup>9</sup> Rupiah kehilangan 85% nilainya, ribuan perusahaan bangkrut dan sekitar 6,5 juta pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan pada tahun 1998-1999 saja (Rachbini, 1999). Pengalaman itu tentunya membuat kita lebih waspada akan risiko yang harus dihadapi jika gagal menjaga kesetaraan ekonomi.

### **Takkan Berakhir Jika Tidak Diakhiri**

Ketimpangan ekonomi, menurut para pakar, disebabkan oleh dua faktor utama, faktor pasar dan faktor institusi.

#### *Faktor Pasar*

Faktor pasar muncul akibat adanya bias di mana globalisasi meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan *skill* tertentu, sehingga mereka yang memiliki *skill* tersebut akan mengalami peningkatan pendapatan; terutama dikalangan yang melek teknologi (Lazear, 2006).

---

<sup>9</sup> Kalkulasi penulis, berdasarkan data World Bank Development Indicator (WDI), 2013, ekonomi hanya tumbuh 0.7% dalam periode 1998-2003.

Ketika negara maju mulai merelokasi industri berteknologi rendah ke negara berkembang, maka pendapatan mereka yang berada di industri tersebut akan berkurang; memperburuk ketimpangan pendapatan.

Sementara itu, *gap* pendapatan antara negara maju dan berkembang menjadikan apa yang tidak menarik secara ekonomi di negara maju masih dianggap menarik di negara berkembang. Mereka yang mempunyai kapasitas untuk menerima limpahan dari negara maju tersebut kemudian naik kelas, meninggalkan mereka yang tetap berkulat di sektor lama, seperti sektor pertanian.

Tanpa campur tangan pemerintah, kelompok yang terpinggirkan semakin terpuruk, di mana mereka mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang minim, kapasitas mereka untuk bersaing pun melorot. Sebaliknya, mereka yang berada di atas akan memasuki proses *virtuous cycle*, di mana kelompok ini semakin berdaya saing dan dominan. Dampaknya, segregasi antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan semakin melebar dengan berjalannya waktu.

### *Faktor Institusi*

Keberpihakan institusi sangat krusial dalam mendisain struktur perekonomian suatu negara. Bahkan Krugman (2009) mempunyai pandangan yang cukup ekstrem dengan mengatakan bahwa ketimpangan adalah akibat keberpihakan institusi, pergeseran norma dan bias kekuatan politik; bukan karena faktor pasar. Faktor institusi ini terefleksi dalam berbagai kebijakan pemerintah, dan karakter institusi terlihat dari keberpihakan kebijakan yang ditelorkan, apakah bias pada kelompok tertentu, atau mampu menjaga integritas dengan menomorsatukan *equity*. Dalam bukunya “*Why Nations Fail?*”, Daron Acemoglu dan James Robinson (2012) menjabarkan pentingnya peran institusi politik dan institusi ekonomi dalam mendorong kemajuan dan kesetaraan. Ketika suatu negara memiliki institusi ekonomi dan politik yang inklusif, maka negara akan mampu mewujudkan kesejahteraan sekaligus kesetaraan.

Masih menurut Acemoglu dan Robinson (2012), institusi ekonomi dan politik yang inklusif ditandai dengan adanya kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi dan politik, tanpa ada pembedaan perlakuan. Sementara itu, institusi yang eksklusif hanya memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu saja.

Jika institusi politik dikuasai oleh kelompok tertentu saja (para *oligarch*), maka oligarki ini akan berusaha mempertahankan eksistensinya; mereka berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi (Winters, 2011). Lalu, munculah *rent-seeker*, yaitu kelompok yang mendapatkan keuntungan tanpa berusaha atau dengan mengambil hak orang lain (Stiglitz, 2012). Kehadiran para *rent-seeker* merupakan fenomena yang khas di negara berkembang dengan ketimpangan ekonomi yang lebar.

Sementara itu, ketika di suatu negara didominasi oleh institusi ekonomi yang eksklusif, berbagai kelompok bisnis akan mencari payung dari kelompok politik yang berkuasa untuk melanggengkan praktiknya; melalui donasi atau *money politic*. Dampaknya, kolaborasi antara kedua institusi akan melahirkan masyarakat yang terkotak-kotak dalam kasta ekonomi dan politik. Ketimpangan sudah pasti akan semakin tajam.

Negara di Afrika seperti Zimbabwe, Uganda, dan Sudan merupakan contoh klasik negara-negara dengan institusi ekonomi dan politik eksklusif yang sangat kronis. Indonesia jaman Orde Baru dan Filipina jaman Marcos, merupakan contoh lain di Asia Tenggara. Diperlukan krisis ekonomi dan/atau krisis politik besar untuk dapat mengakhirinya.

Ketika kondisi belum terlalu kronis, upaya perbaikan bisa dilaksanakan dengan memperbaiki sistem politik dan ekonomi. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), jika harus memilih mana yang lebih didahulukan, mendorong terciptanya institusi politik yang inklusif merupakan batu pijakan pertama.

Demokrasi perlu terus didorong supaya lebih berkualitas. Sehingga yang terjadi adalah *one man one vote*, bukan *one dollar one vote* seperti kata Stiglitz (2012). Dalam konteks ini, tantangan Indonesia tidaklah mudah. Menurut Prof. Juwono Sudarsono, saat ini baru sekitar 20% rakyat Indonesia *can afford democracy*, dalam kata lain hanya 20% yang mampu melaksanakan pilihan cerdas dalam pemilu lalu ikut mengawasi kinerja para wakilnya.<sup>10</sup> Artinya, memiliki demokrasi berkualitas masih merupakan mimpi bagi rakyat Indonesia, dan upaya untuk mewujudkannya harus menjadi prioritas utama.

### **Meluruskan Esensi Pembangunan**

Tujuan berdirinya Negara Kesatuan Indonesia, seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, “sejahtera” artinya “makmur, aman dan damai”, mengandung dimensi jasmani dan ruhani; sedangkan “umum” artinya “secara menyeluruh dan tidak menyangkut yang tertentu saja”.<sup>11</sup> Indonesia hadir untuk memajukan seluruh rakyat tanpa kecuali, secara jasmani dan ruhani. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu sila dari Pancasila, menggambarkan ide yang sama.

Lebih jauh lagi, batang tubuh UUD 45 mengandung beberapa pasal dan banyak ayat yang memberikan koridor tentang bagaimana pembangunan Indonesia seharusnya dijalankan.

UUD 45 menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak untuk:

- mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27, ayat 2);

---

<sup>10</sup> Diskusi dengan Prof Juwono Sudarsono, di Hotel Shangrilla, Jakarta, Juni 2013

<sup>11</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/umum#ixzz2pd6S3Ehl>

- mendapatkan pendidikan dan kesempatan berkembang (pasal 28C);
- bekerja serta mendapat imbalan yang adil (pasal 28D);
- hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28E, ayat 1); dan
- mendapatkan jaminan sosial (pasal 28E, ayat 3);
- UUD 45 juga menjunjung tinggi asas pemerataan dalam perekonomian dan asas kesejahteraan sosial, terlihat dari konsep berikut ini:
- perekonomian berasas kekeluargaan (pasal 33, ayat 2);
- penguasaan oleh negara atas cabang produksi strategis dan kekayaan alam, yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat (pasal 33, ayat 2 & ayat 3);
- perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34, ayat 1);
- negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah (pasal 34, ayat 2); dan
- negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak (pasal 34 ayat 3).

Menurut Didik Rachbini, kendatipun Pancasila dan UUD 45 menekankan pentingnya konsep kebersamaan, termasuk dalam pembangunan ekonomi, tetapi dalam kenyataannya arah pembangunan cenderung liberal dan kapitalistik. Erani Yustika menambahkan, bahwa *gap* yang lebar terjadi antara pasal-pasal dalam UUD 45 dengan implementasi di lapangan akibat semangat UUD 45 tersebut tidak terefleksikan dengan baik dalam berbagai kebijakan dibawahnya. Selalu menengok kembali kepada konstitusi kita merupakan hal yang harus dilakukan, supaya pembangunan Indonesia mempunyai arah yang jelas, tambah Arif Budimanta.<sup>12</sup>

Semakin melebarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, masih lebarnya perbedaan kesejahteraan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, semakin terpuruknya masyarakat di daerah perbatasan, dan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum terpenuhi kebutuhan minimal adalah bukti ada sesuatu yang salah dalam konsep pembangunan.

Menggunakan pendekatan pasar tidaklah salah, bahkan merupakan langkah jitu supaya sebuah ekonomi tidak terisolasi dan mampu mengambil manfaat dari pikiran kreatif masyarakat dunia. Kebangkitan China justru

---

<sup>12</sup> Diskusi pakar bertema “Memikirkan Kembali Disain Perekonomian Indonesia”, oleh Universitas Paramadina dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), pada 25 November 2013, di Jakarta.

dimulai oleh pragmatisme Deng Xiao Ping yang menginisiasi reformasi ekonomi China, dengan memperkenalkan konsep persaingan dan mekanisme pasar. Kebangkitan Jepang dimulai dari kemauan membuka diri termasuk di bidang ekonomi.

Apa pun konsep yang diterapkan, ide tentang kesejahteraan sosial yang tersari dalam Pancasila dan UUD 45 harus tetap menjadi pedoman bagi setiap langkah dan menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan. Hanya dengan begitu esensi pembangunan Indonesia akan selaras dengan esensi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Langkah-langkah Perbaikan**

Dalam kalimat yang lebih lugas, tujuan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warganegara. Jika tujuan utama pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia, menurut Bentham (1789/2008), maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan, keadilan dan kepercayaan. Kesetaraan diwujudkan dengan pemeratakan kemakmuran, sehingga kebijakan pemerintah dibuat untuk mendorong kelompok miskin menjadi makmur, bukan sebaliknya dengan menghambat laju kelompok makmur.

Melalui berbagai kebijakan, beberapa negara mampu menurunkan Gini aktual secara drastis. Austria, Belgia, Jerman Finlandia dan Itali menurunkan Gini hampir separuhnya melalui berbagai kebijakan, meliputi kebijakan pajak dan transfer. Tanpa kebijakan tersebut, mereka akan termasuk dalam kategori negara yang paling timpang di dunia dengan, Gini income sekitar 0,50 atau bahkan lebih.

Fenomena tersebut kontras dengan pengalaman Colombia di mana kebijakan pemerintah justru meningkatkan Gini. Ini terjadi karena kelompok kaya justru lebih banyak menikmatinya (Luebker, 2011). Secara sadar atau tidak sadar, pemerintah terkadang mengeluarkan kebijakan yang “berpihak” kepada kelompok yang sudah makmur.

Meminjam pendapat Stiglitz (2012), sebagian besar penyebab ketimpangan adalah hasil dari kebijakan pemerintah baik itu yang dikeluarkan, maupun yang tidak; artinya, kebijakan publik mempunyai kekuatan besar. Belajar dari pengalaman negara lain dan menganalisis secara mendalam kondisi di Indonesia, ada sederet upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan, meliputi:

#### *Menempatkan Kesetaraan sebagai Target Kinerja Pembangunan*

Keadilan sosial merupakan nafas konsep pembangunan kita, walaupun demikian, dalam implementasinya berbagai kebijakan belum merefleksikannya dengan baik. Hal ini, nampak dari alokasi anggaran APBN serta asumsi atau target yang dipergunakan dalam proses penyusunan.

Selama ini, asumsi APBN selalu berkuat pada beberapa indikator makroekonomi seperti: pertumbuhan GDP, nilai tukar Rupiah, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, *volume* produksi minyak dan gas bumi, serta harga jual minyak. Asumsi dan target tersebut terefleksi dalam berbagai program Pemerintah dan disain alokasi APBN.

Ketika indikator yang dipakai jauh dari unsur kesetaraan dan kesejahteraan sosial, maka permasalahan akan muncul. Menempatkan indikator inklusif seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan GINI *income* akan sangat membantu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

### *Merevisi Definisi Kemiskinan dan Pengangguran*

Menekan angka kemiskinan dan pengangguran merupakan kunci penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan berada pada angka 11,47% dan 6,25%. Di atas kertas, kita merasa telah berhasil memperbaiki keadaan, tetapi pada kenyataannya masih begitu banyak rakyat hidup miskin dan menganggur. Permasalahannya, standar yang dipergunakan untuk mengukur terlalu rendah.

BPS menggunakan Rp 292.951 per kapita per bulan sebagai garis kemiskinan. Angka ini setara dengan US Dollar 1,25 per kapita per hari. Menurut Martin Ravallion (2010), garis kemiskinan negara-negara di dunia berkisar antara US Dollar 0,62 hingga US Dollar 43 per kapita per hari, dimana rata-rata garis kemiskinan di 15 negara termiskin di dunia adalah US Dollar 1,25. Artinya, Indonesia selama ini menggunakan garis kemiskinan yang setara dengan 15 negara termiskin di dunia. Indonesia harus berani menggunakan standar yang lebih tinggi.

Sementara itu, Indonesia menggunakan standar *International Labor Organization* (ILO) untuk mengukur pengangguran, di mana mereka yang masuk dalam angkatan kerja (berusia di atas 15 dan berniat untuk bekerja) dan bekerja selama minimal satu jam per-minggu masuk dalam kategori bekerja. Standar ini terlalu rendah dan perlu disesuaikan.

Pakar manajemen mengatakan bahwa kita harus mampu mendefinisikan sesuatu dengan benar, sehingga mampu mengukurnya, untuk kemudian berhasil mengaturnya dengan baik. Dalam konteks upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan, nampaknya kita perlu mengubah definisi pengangguran dan kemiskinan, sehingga kita akan berhasil memperbaiki keadaan. Tanpanya, kita hanya berhasil memperbaikinya di atas kertas, merasa nyaman dan *complacent*, padahal di dunia nyata tidak terjadi perubahan yang nyata.



### *Menghilangkan Kebijakan yang Justru Memperlebar Ketimpangan*

Setiap kebijakan publik selalu mempunyai dampak langsung (*direct impact*) dan dampak tidak langsung (*indirect impact*). Dampak *indirect* ini bisa bersifat positif (*intended consequence*) maupun negatif (*unintended consequence*). Di bagian lain *paper* ini didiskusikan betapa berbagai insentif pemerintah Colombia untuk mengurangi kemiskinan justru meningkatkan Gini, sebuah dampak tidak langsung yang tidak diharapkan. Dalam konteks ini setiap Pemerintah tidak terlepas dari potensi untuk melakukan kesalahan yang sama.

Dalam konteks Indonesia, salah satu contoh yang paling mencolok adalah kebijakan subsidi energi yang setiap tahunnya menghabiskan sekitar Rp 300 triliun. Kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi dan membantu kelompok miskin ini justru berpotensi menghasilkan sesuatu yang bertolak belakang.

Subsidi berpotensi menciptakan ilusi daya saing, sehingga jika subsidi tersebut dikeluarkan dari kalkulasi maka industri di Indonesia justru akan kesulitan untuk bersaing. Selain itu, subsidi BBM berpotensi salah sasaran. Menurut World Bank (2012), sekitar 80% subsidi BBM justru dinikmati oleh mereka yang mampu, sehingga subsidi BBM justru meningkatkan ketimpangan.

Mengurangi, atau menghilangkan subsidi, adalah langkah strategis yang perlu ditempuh oleh pemerintah, selain berpotensi mengurangi ketimpangan, upaya tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi bagi memperbaiki kesetaraan.

### *Memberikan Perhatian Khusus kepada Para Petani*

Sektor pertanian mempekerjakan sekitar 39% tenaga kerja (BPS, 2013), tetapi hanya mewakili sekitar 13% GDP, di mana dari tahun ke tahun proporsi tersebut tersebut mengalami penurunan, ditandai dengan pertumbuhan sektor pertanian yang rata-rata 2,2% lebih rendah dari pertumbuhan GDP. Selain itu, kepemilikan tanah yang sempit per petani. Proses pewarisan antar generasi membuat tanah yang sempit tersebut semakin sempit menjadikan kondisi semakin menantang.

Situasi ini, menempatkan pertanian sebagai kantung kemiskinan di Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Jumlah petani “gurem” pun akan meningkat.<sup>13</sup> Tanpa upaya memperbaiki kesejahteraan para petani, upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tidak akan berhasil. Upaya mendorong kesejahteraan petani bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan bibit, pupuk, dan manajemen pertanian. Sebagai contoh, saat ini produksi rata-rata per hektar padi di Indonesia adalah 5,06 ton (BPS, 2010), jauh lebih rendah dari

---

<sup>13</sup> Gurem adalah bahasa Jawa untuk kutu yang tinggal di tubuh ayam, mereka kecil dan terlihat sangat memprihatinkan.

negara lain seperti China yang sudah mencapai lebih dari 6,5 ton per hektar.

Selain itu, memperbaiki manajemen informasi berperan penting. Saat ini para petani sering dirugikan karena *over supply* produksi, akibat mereka mengikuti *trend* dan menanam tanaman yang sama, sehingga harga mengalami penurunan drastis. Upaya lain, seperti meningkatkan nilai tambah produk, dengan tidak saja menjual produk pertanian mentah, tetapi dengan proses tertentu, sehingga meningkatkan harga jual merupakan alternatif yang layak untuk disokong.

Ditengah-tengah kesulitan yang mendera, para petani kita harus berhadapan dengan para pemain global. Dalam konteks ini, kebijakan impor produk pertanian perlu diatur dengan baik. Kebijakan memang harus selaras dengan berbagai komitmen global, ketentuan AFTA dan WTO, tetapi keberpihakan kepada para petani perlu dipelihara. Jepang, negara-negara EU dan Amerika Serikat adalah contoh terbaik bagaimana Pemerintah mereka berupaya menjaga keseimbangan tersebut, dengan tetap menonjolkan keberpihakan kepada para petani mereka.

Kepemilikan tanah yang sempit adalah faktor *exogenous* yang tidak bisa dicarikan solusi, karena wilayah negeri ini tidak bertambah luas. Untuk generasi penerus para petani perlu disiapkan area lain, *training skill* diperlukan untuk menyiapkan mereka mengeksplorasi sektor yang lebih produktif, misalnya peternakan atau industri dan jasa.

### *Empowerment untuk Mereka yang Miskin*

Aktivitas ekonomi produktif merupakan penyebab membesarnya kue ekonomi suatu negara, dan keterlibatan dalam aktivitas tersebut memakmurkan individu. Dalam kata lain, ketidakmampuan untuk terlibat merupakan sebab mengapa individu gagal untuk makmur. Memfasilitasi mereka untuk mampu mengatasi hambatan merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah.

Hambatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif meliputi dua faktor, yaitu masalah kapasitas dan akses. Masyarakat hanya akan makmur jika mereka mempunyai kapasitas dan akses untuk terlibat. Secara diagramatik, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kapasitas untuk berpartisipasi sangat beragam, beberapa yang paling krusial di antaranya adalah:

1. *Pendidikan dan skill*: tingginya pengangguran salah satunya disebabkan oleh lebarnya kesenjangan antara *skill* yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dengan pengetahuan dan *skill* tenaga kerja. Kesenjangan ini umum dialami oleh mereka yang kurang mampu, yang tidak mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas. Menyediakan pendidikan terjangkau bagi masyarakat miskin merupakan upaya penting untuk menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi dalam suatu negara, yang berujung pada masyarakat yang setara. Berbagai program, termasuk sekolah murah/gratis dan beasiswa

bagi mereka yang kurang mampu merupakan langkah penting yang harus diambil.

2. *Kesehatan*: kapasitas tanpa ditunjang oleh kesehatan tidaklah bermanfaat. Tingkat kesehatan yang rendah mempengaruhi produktivitas kerja bagi orang dewasa dan kecerdasan bagi anak-anak. Selain itu, tingkat kesehatan yang tidak terjaga juga mempengaruhi usia harapan hidup dan panjang usia produktif seseorang; faktor yang berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran.

Salah satu kendala masyarakat miskin untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif adalah tingkat kesehatan yang rendah yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya sanitasi yang buruk, polusi yang parah, kualitas makanan yang rendah, serta fasilitas rumah sakit yang terbatas dan tidak terjangkau. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan melalui program BPJS merupakan terobosan bagus; walaupun masih meninggalkan catatan panjang, terutama terkait dengan isu *governance*, efisiensi, pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan.

3. *Ketiadaan modal*: Masyarakat Indonesia terkenal memiliki semangat *entrepreneurial* yang tinggi, apa pun bisa menjadi bisnis. Sayangnya, tidak banyak dari bisnis tersebut akhirnya berkembang menjadi besar. Fenomena "*hollow middle*", di mana Indonesia mengalami defisit jumlah perusahaan ukuran menengah, merupakan hasil akhirnya. Mereka yang sudah memulai tertahan dibawah untuk waktu yang lama.

Faktor yang sering menghambat pertumbuhan bisnis kecil di antaranya adalah ketiadaan akses terhadap modal. Bunga bank yang tinggi dan persyaratan administratif yang berat membuat banyak perusahaan kecil di Indonesia tidak *bankable*. Program pemerintah seperti kredit dengan bunga terjangkau bagi pengusaha kecil perlu didorong lagi. Saat ini Pemerintah sudah memulainya dengan memperkenalkan Kredit Usaha rakyat (KUR), tetapi tentunya jauh dari mencukupi. Volume perlu dilipatkan dengan bunga lebih terjangkau dan persyaratan yang disederhanakan.

Sementara itu, walaupun seseorang mempunyai kapasitas yang bagus, tetapi tanpa akses yang baik, potensi hanya akan tetap menjadi potensi belaka. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat untuk berpartisipasi, di antaranya adalah:

1. *Infrastruktur yang buruk*: Infrastruktur yang buruk menghambat masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berpotensi memakmurkan. Ketiadaan *supply* listrik yang dapat diandalkan di pedesaan membuat industri kecil tidak berjalan, sehingga sebagian wanita pun "terpaksa" berubah profesi menjadi TKI. Jalanan yang buruk menyebabkan hasil perkebunan tidak dapat terangkut untuk dipasarkan. Ketiadaan pasar lelang ikan dan jalan menuju kampung nelayan membuat para nelayan tidak bisa memasarkan hasil tangkapannya.

Infrastruktur yang buruk berdampak lebih besar bagi kelompok miskin di negeri ini; selain karena kelompok yang lebih mampu mempunyai kekuatan untuk meresponse keterbatasan itu dengan aksi privat. Situasi ini secara langsung akan semakin memperparah tingkat kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan ekonomi.

2. *Fasilitas umum*: berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas untuk publik akan menciptakan masyarakat yang lebih setara, fasilitas umum yang memadai akan membuat mereka yang miskin lebih mampu untuk berkompetisi. Misalnya, buruknya transportasi umum di Jakarta telah menurunkan produktivitas para pekerja, terutama mereka di kelompok bawah yang umumnya tinggal jauh dari pusat kota dan harus *commutte* selama beberapa jam dalam sehari menuju dan dari tempat kerja.

Situasi ini tentu saja mempengaruhi semua golongan, tetapi mereka yang makmur mempunyai kemampuan untuk merespon. Mereka bisa mencari tempat tinggal di tengah kota, atau menyiapkan fasilitas transportasi pribadi yang dilengkapi dengan AC, fasilitas hiburan, fasilitas IT dan sopir; sehingga produktivitas mereka pun tetap terjaga.

Ketiadaan prasana transportasi publik yang layak telah mengganggu akses rakyat kebanyakan, terutama mereka yang tak mempunya; fenomena ini hanya satu dari banyak contoh yang lain. Jika tidak diperbaiki, ketimpangan ekonomi akan semakin lebar.

3. *Fasilitas untuk para disable*: di berbagai negara maju, para *disable* difasilitasi untuk tetap mempunyai mobilitas sehingga dapat ikut terlibat dalam aktifitas ekonomi produktif. Dampaknya, mereka bisa mandiri dan meningkatkan kemakmurannya. Sayangnya, di Indonesia, fasilitas umum masih jauh dari nyaman bagi kalangan *disable*, sehingga mereka yang *disable* benar-benar menjadi *disable* secara ekonomi.

Data tentang jumlah *disable* di Indonesia tidak lah tersedia dengan baik. Kendatipun demikian diyakini sangat tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah *disable* netra saja mencapai 3,5 juta, atau setara dengan 1,43% penduduk. Apabila kita perhitungkan *disable* dalam kategori lain, jumlahnya akan jauh lebih besar. Apabila tidak difasilitasi, mereka akan berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi, sebaliknya jika di *empower*, mereka akan bisa berkontribusi bagi bangsa. Dalam dataran yang lebih filosofis, para *disable* adalah warganegara Indonesia yang perannya jauh dari sekedar peran ekonomi, di mana konstitusi menugaskan negara untuk memfasilitasinya.

Sebagian dari yang diungkapkan di atas sudah menjadi program Pemerintah Indonesia, walaupun demikian kualitas implementasi dan ukuran program yang terlalu kecil merupakan isu yang membuat pemerintah sering dianggap kurang peduli.

## Penutup

Indonesia, satu-satunya anggota G-20 di ASEAN, telah menunjukkan sederet prestasi ekonomi di tingkat global. Berbagai lembaga internasional menjadikan Indonesia sebagai contoh sukses. Pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dalam satu dekade terakhir membuat dunia melihat Indonesia sebagai calon pemain penting ekonomi global. Indonesia pernah mengalami situasi yang sama, pada tahun 80-an ketika booming minyak bumi, dan pada pertengahan 90-an, ketika era *Asian Miracle*. Sayangnya, terlepas dari berbagai pujian, kedua era tidak berakhir dengan *happy ending*.

Pengalaman tersebut hendaknya membuat kita selalu waspada, mengingat apa yang terjadi dimasa lalu bukan tidak mungkin akan terulang. Apalagi pertumbuhan dalam satu dekade terakhir ternyata diiringi dengan peningkatan ketimpangan ekonomi; bahkan saat ini tingkat ketimpangan ekonomi kita adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Tentunya, hal ini tidak selaras dengan cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Menempatkan kembali prinsip-prinsip keadilan sosial dalam setiap program pembangunan nasional merupakan langkah yang perlu ditempuh.

Kemajuan tanpa kesetaraan tidak saja berseberangan dengan konstitusi dan dasar negara, tetapi juga tidak akan mewujudkan esensi utama pembangunan, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia. Terlebih lagi, ketimpangan ekonomi justru akan mengancam keberlanjutan kemajuan itu sendiri, apalagi Indonesia adalah negeri yang sangat *bhinneka*; sayangnya Pemerintah kita belum cukup memberikan perhatian untuk isu penting ini.

*Local wisdom* kuno bangsa Afrika mengatakan “*If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together.*”<sup>14</sup> Jika ingin tumbuh pesat, kita tidak perlu mengindahkan ketimpangan, tetapi kita harus bersiap bahwa perjalanan kita tidak akan jauh karena kita akan menghantam tembok; sebaliknya, jika kita ingin berjalan jauh maka kita harus menempatkan kesetaraan ditempat yang penting, hanya dengan begitu bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Acemoglu D., Robinson J. (2012), *Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, Profile Book Ltd.
- Bentham, J. (2008), dalam Oishi Shigerio, *Kesebir Selin*, Diener Ed (2012) *Income Inequality and Happiness*, *Psychological Science*, 22(9) 1095-1100.

---

<sup>14</sup> Menyitir sambutan pembukaan oleh Dirut Bank Mandiri, dalam acara Mandiri Investment Forum 2013, di Jakarta 10 November 2013.

- Braithwaite, John. (1979), dalam Lederman D., Fajnzylber P., & Loayza N., (2002), *Inequality and Violent Crime*, *The Journal of Law and Economics*, vol. XLV.
- Branko Milanovic, (2011), dalam *World Income Inequality, is the world becoming more unequal?*, (2012), The Conference Board of Canada, diakses di <http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/worldinequality.aspx>.
- Budiman Arief, Oberman Raoul, Thompson Fraser, Rossé Morten & Dobbs Richard (2012), *The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential*, McKinsey Global Institute, dapat di akses di [http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the\\_archipelago\\_economy](http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy).
- Buchholz. G. Todd (1989), *New Ideas from dead Economist: An Introduction to Modern Economics Thought*, Plume Penguin Group.
- Conway Edmund, (2012), *50 Ideas You Really Need to Know: Economics*, Publisher: Quercus.
- Delhey, J. dan Newton, K (2005), dalam Steijn, S. dan Lancee, B. (2011). *Does Income Inequality Negatively Affect General Trust?* Amsterdam, IAIAS, Gini Discussion Paper 20, dapat di akses di [222.Gini-research.org](http://222.Gini-research.org).
- De Soto Hernando, (2003), *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Basic Books 2003.
- Deininger & Squire, (1998), dalam Barro Robert, (2012), *Inequality, Growth and Investment*, Course Material.
- Easterlin, R. A., (1974), *Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence*, dalam Oishi Shigerio, Kesebir Selin, Diener Ed (2012) *Income Inequality and Happiness*, *Psychological Science*, 22(9) 1095-1100.
- Edward P. Lazear, (2006), dalam *World Income Inequality, is the world becoming more unequal?*, (2012), The Conference Board of Canada, diakses di <http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/worldinequality.aspx>.
- Helliwell John., Layard, R., Sachs J., (2013), *World Happiness Report*, United Nations.
- Kennedy, B., Kawachi, I., Wilkinson R.G., (1998), dalam Thorbecke, E. Charumilind, C. (2002) *Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact*, *World development* Vol. 30, No. 9. Elsevier Science Ltd, 2002.
- Kosfeld M., Heinrichs M., Zak P.J., Fishbacker U., & Fehr E., (2005), dalam Wilkinson Richard & Pickett Kate, (2011), *The Spirit Level: Why Equality is better for Everyone*, Publisher: Bloomsbury Press.
- Krugman Paul, (2009), dalam Wilkinson Richard & Pickett Kate, (2011), *The Spirit Level: Why Equality is better for Everyone*, Publisher: Bloomsbury Press.

- Layard R., (2005), dalam Wilkinson Richard & Pickett Kate, (2011), *The Spirit Level: Why Equality is better for Everyone*, Publisher: Bloomsbury Press.
- Lederman D., Fajzylber P., & Loayza N., (2002), *Inequality and Violent Crime*, *The Journal of Law and Economics*, vol. XLV.
- Luebker Malte (2011), *The Impact of Taxes and Transfer to Inequality*, Travail Policy Brief No. 4, International Labor Organization, Geneva.
- Mankiw Greg, (2011), *Principle of Economics*, Cengage Learning.
- Okun Arthur M, (1975), *Equality and Efficiency, The Big Tradeoff*, Brookings Institution Press.
- Persson Torsten, Tebellini Guide, (1991), *Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Practice*, Working paper No 3599, National Bureau of Economic Research, Washington DC, USA.
- Persky Joseph, Felzenshtain Daniyel, Carlson Virginia, (2004), *Does "Trickle Down" Work?: Economic Development Strategies and Job Chains in Local Labors Market*, WE Upjohn Institute for Employment Research, Michigan, USA.
- Preston S. H., (1975), dalam *Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact*, World development Vol. 30, No. 9. Elsevier Science Ltd, 2002.
- Putnam, R.D. (2000), dalam Wilkinson Richard & Pickett Kate. (2011) *"The Spirit Level: Why Equality is better for Everyone*, Publisher: Bloomsbury Press.
- Ravallion Martin, (2010), *Poverty Lines across the World*, Policy Research Paper, The World Bank Development Resaerch Group.
- Rachbini Didik, dalam Gilarso T, (2004), *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Halaman 210, Penerbit Kanisius.
- Richard Freeman, (2011), dalam *World Income Inequality, is the world becoming more unequal?*, (2012), The Conference Board of Canada, diakses di <http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/worldinequality.aspx>.
- Sachs D Jeffrey & Warner Andrew M., (1995), *Economic Convergence and Economic Policy*, Working Paper No. 5039, National Bureau of Economic research, MA.
- Summers, Kravis & Heston, (1984), dalam Barro Robert, (2012), *"Inequality, Growth and Investment"*, Course Material.
- Stack Steven (1984), dalam Lederman D., Fajnzylber P., Loayza N., (2002), *Inequality and Violent Crime*, *The Journal of Law and Economics*, vol. XLV.
- Steijn, S. dan Lancee, B. (2011), *Does Income Inequality Negatively Affect General Trust?* Amsterdam, IAIAS, Gini Discussion Paper 20, dapat di akses di [222.Gini-research.org](http://222.Gini-research.org).
- The Economist, (2012), *As you were: After a period on the wane, inequality is waxing again*, diakses di <http://www.economist.com/node/21564413>.

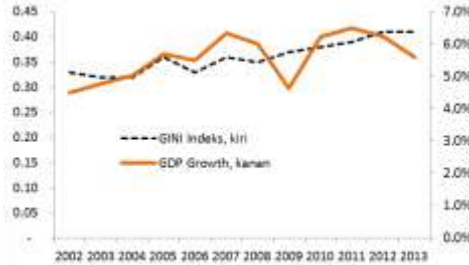
- Thorbheckhe, E., Charumilind, C. (2002,) Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact, World development Vol. 30, No. 9. Elsevier Science Ltd, 2002.
- Wilkinson R. G., (2000), dalam Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact, World development Vol. 30, No. 9. Elsevier Science Ltd, 2002.
- Wilkinson R. G., (1996), dalam Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact, World development Vol. 30, No. 9. Elsevier Science Ltd, 2002.
- Wilkinson Richard & Pickett Kate, (2011), The Spirit Level: Why Equality is better for Everyone, Publisher: Bloomsbury Press.
- Winters Jeffrey, (2011), Oligarchy, Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_, BBC, Tunisia: President Zine al-Abidine Ben Ali forced out, accessed on December 11, 2013, at the following link: <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12195025>.
- \_\_\_\_\_, (2012), U.S. Census Bureau Poverty Thresholds, 2012, dapat diakses di <http://www.irp.wisc.edu/faqs/faq1.htm>.
- \_\_\_\_\_, (2013), World Bank Indonesia Economic Quarterly: Slower growth; high risk.
- \_\_\_\_\_, (1997), Indonesia Family Life Survey, Rand Corporation, dalam Davies J.B., Sandstrom S., Shorrocks A.B., Wolff E.N. (2009), The Level and Distribution of Global Household Wealth, NBER Working paper Series, National Bureau of Economic Research, MA, 2009.
- \_\_\_\_\_, (2013), Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2013, Berita Resmi Stastitik, No 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014, dapat diakses di [http://www.bps.go.id/brs\\_file/kemiskinan\\_02jan14.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan14.pdf).
- \_\_\_\_\_, (2013), Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2006 - 2012 (Persen), BPS dapat diakses di [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=52&notab=3](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=52&notab=3).
- \_\_\_\_\_, (2012), Reducing income inequality while boosting economic growth: Can it be done? Economic Policy reforms 2012, Part II, Chapter 5, Going for Growth, OECD.
- \_\_\_\_\_, (2012), World Income Inequality, is the world becoming more unequal?, The Conference Board of Canada, diakses di <http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/worldinequality.aspx>.
- \_\_\_\_\_, (2013), The World Factbook, Central Inteligence Agency, USA, bisa diakses di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html>.
- \_\_\_\_\_, William Petty (1623-1687), Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900.
- \_\_\_\_\_, (2011), Multipolarity: The New Global Economy, Global Development Horison 2011, World Bank, dapat diakses di <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08304.pdf>.



- \_\_\_\_\_, (2013), *World in 2050, The BRICs and Beyond: Prospect, Challenges and Opportunities*, Pricewaterhouse Coopers, dapat di akses di [http://www.pwc.com/en\\_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf](http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf).
- \_\_\_\_\_, The Guardian, “Bobby Kennedy on GDP: 'measures everything except that which is worthwhile'”, accessed on December 29th, 2013 at <http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/may/24/robert-kennedy-gdp>.

**Daftar Tabel dan Gambar**

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Gini**

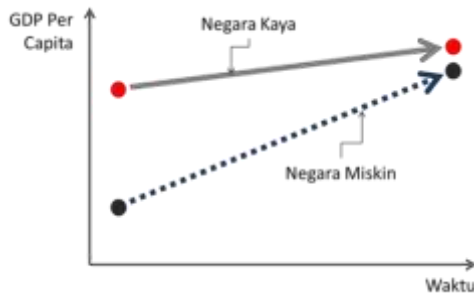


**Tabel 2. Ilustrasi Kurva Kuznets**

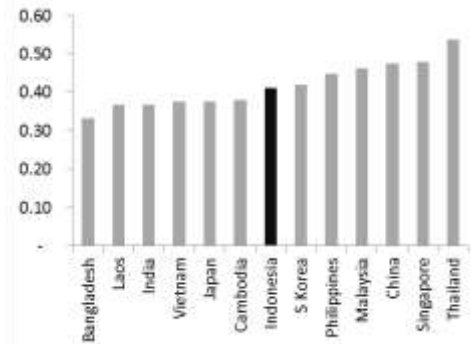


Sumber: BPS, diolah oleh penulis

**Tabel 3. Ilustrasi Konvergensi Pendapatan Antar Negara**

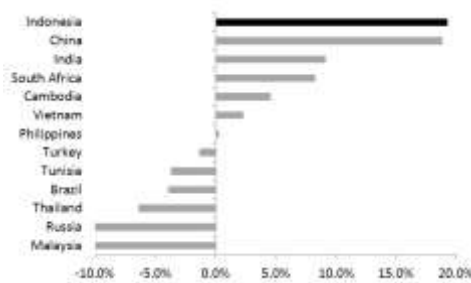


**Tabel 4. Gini Beberapa Negara di Kawasan<sup>15</sup>**



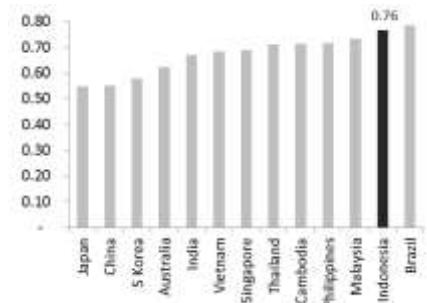
Sumber: CIA Factbook (2013)

**Tabel 5. Perubahan Gini (2000s vs 1990s)**



Sumber: World Development Indicator 2013, kalkulasi oleh penulis

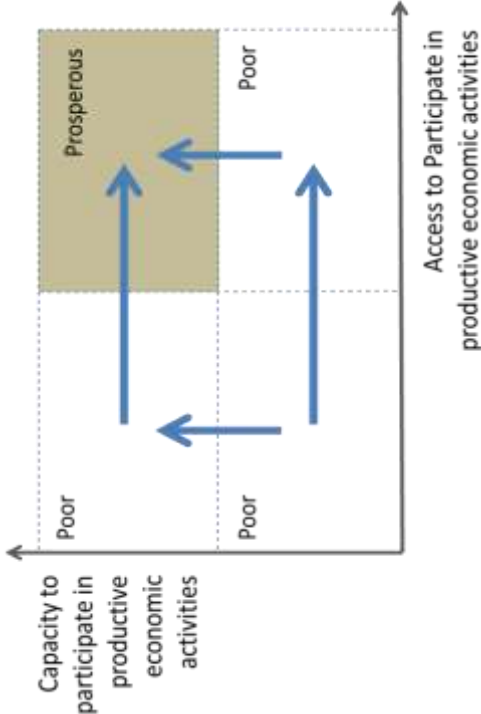
**Tabel 6. Gini Kekayaan Beberapa Negara (2000)**



Sumber: Berbagai Sumber (Davies, 2009)

<sup>15</sup> Menggunakan data terakhir yang tersedia, berkisar antara 2006-2012.

Gambar 1. Jalan Menuju Kemakmuran



Sumber: Paramadina Public Policy Institute (FPPI), Universitas Paramadina